

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chairul Bariah Mozasa. (2005). *Aturan-aturan Hukum Trafficking Perdagangan Perempuan dan Anak*. Medan : USU Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Hadi Supeno. (2010). *Memahami Konveksi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Zalco Pratama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. (2005). *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses penegakan Hukum*. Jakarta: International Organization for Migrations Mission In Indonesia dan NZAID.
- Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2004). *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) di Indonesia*.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung. L. (2009). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komnas Perempuan. (2023). *Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: minimnya perlindungan dan pemulihan*. CATAHU 2023 Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Marzuki Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Persada Media Grub.
- Praticia H. Beme & Louis M. Savary. (1988). *Membangun Harga Diri Anak*. Yogyakarta: Kansius.

- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2010). *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.*
- R. Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Syafaat. (2002). *Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama.
- Ridwan. H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sheyla Nichatus Sovia dkk. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soetjipto, R. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung Alumni.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 237 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946).

C. Jurnal

Abdullah, D. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(2).
<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.945>

Ardianto, S. Y. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).
<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1041>

- Fadilla, N. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 5(2). <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>
- Gosita, A. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v6i2.5403>
- Melati, D. P. (2015). *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 2(1). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Wijaya, E. (2010). *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*. *Jurnal Yudisial*. 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). *Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang*. *Yustisia Jurnal Hukum*. 3(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soetiono. (2004). *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

E. Website

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*. Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB Melalui <https://kekerasan.KPPPA.go.id>

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)*. Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2024 Pukul 15.30 WIB Melalui <https://www.KPPPA.go.id>

SIGA KPPPA. (2022). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami (2021)*. Diakses pada tanggal 17 Maret 2024 Pukul 15.50 WIB Melalui <https://siga.KPPPA.go.id>